

DPRD Diingatikan Kawal Program Pemko Medan Sejak Perencanaan



Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung (kelima kiri) didampingi para pimpinan DPRD setempat saat menerima kunjungan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution (keempat kiri), di Medan, Senin (16/10). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/10 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan DPRD Kota Medan agar terus mengawal program pemerintah kota (Pemko) setempat sejak perencanaan hingga tahap penyelesaian.

“Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, semuanya harus dilaksanakan secara matang dan penuh pertimbangan agar anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang lebih,” kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Wilayah Sumut, Adlinsyah Nasution saat melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Medan, Senin (16/10).

Ia menilai, program perencanaan secara elektronik (e-planning) yang telah diterapkan Pemko Medan sudah cukup baik dan bahkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Penerapan sistem perencanaan berbasis e-planning, lanjut dia, diyakini efektif meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penganggaran dan pelaksanaan setiap proyek dan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain itu, kata Adlinsyah Nasution yang akrab disapa Coki itu, penerapan e-planning menjadikan setiap program yang dilaksanakan menjadi lebih terukur dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame, menurut dia, DPRD dan Pemko Medan perlu membahas dan memetakannya secara lebih matang.

“Silahkan terlebih dahulu dibuat pemetaannya. Dimana lokasi yang termasuk kategori komersil dan kategori sosial. Untuk Kota Medan, reklame fisik sudah tidak musim lagi, namun harus bisa dicontoh seperti di Jakarta yang telah menggunakan reklame digital,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah merekomendasi agar seluruh honor kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dihapuskan dan anggarannya dialihkan dalam bentuk tambahan tunjangan pegawai (TPP).

“Untuk kegiatan insidentil, bisa dibuat kebijakan yang juga harus di sepakati terlebih dahulu,” ujarnya.

Dikatakannya, Tim Korsupgah KPK menjadwalkan kunjungan rutin setiap dua bulan sekali ke sejumlah kabupaten dan kota di 10 provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung mengapresiasi kunjungan silaturahmi KPK ke kantor

legislatif itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menilai program pengawasan dan pencegahan yang dilakukan KPK tersebut bermanfaat untuk menggugah seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di Kota Medan untuk berbenah. (LMC-02)

Sekretaris DPRD Diingatkan Pertahankan Jati Diri



Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menyampaikan sambutan pada pembukaan orkshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan, di Medan, Jumat (10/2). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 800 peserta terdiri dari Sekretaris DPRD dan staf seluruh Indonesia. (Foto:

LintasMedan/ist)

Medan, 10/2 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin mengingatkan segenap Sekretaris dan staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus senantiasa mampu mempertahankan jati diri sebagai pembantu kepala daerah dalam mendukung pekerjaan legislator melayani masyarakat.

“Sekwan (Sekretaris DPRD) beserta jajarannya harus dapat mengakomodir kebutuhan legislator dalam menjalankan fungsinya dengan tetap berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya, di Medan, Jumat.

Eldin menyampaikan hal itu saat membuka Workshop Nasional Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan yang diikuti sekitar 800 peserta terdiri dari Sekretaris DPRD dan staf seluruh Indonesia.

Menurut dia, tugas sekretaris DPRD cukup menantang karena mengurus lembaga legislatif yang dihuni oleh banyak anggota dari berbagai partai politik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjutnya, terdapat tiga aspek yang harus dikuasai oleh seorang sekwan dalam menjalankan roda administratif DPRD yakni fisik, loyalitas dan kemampuan.

Selain itu, Sekretaris DPRD diharapkan mampu berperan optimal menjadi penghubung komunikasi dan silaturahmi antara legislatif dengan eksekutif.

“Jangan pula Sekretaris DPRD berlaku sebagai anggota dewan. Jadi bertambah pula jumlah legislator nanti,” ujarnya bercanda.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Tri Puguh Priyadi menjelaskan, workshop ini

penting diikuti agar Sekretaris DPRD tidak gamang dalam melayani kebutuhan teknis legislator, terutama berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Diakuinya, mengemban tugas sebagai Sekretaris DPRD memang selalu dalam dilema.

Di satu sisi dia adalah bawahan kepala daerah, namun di sisi lain Sekretaris Dewan bertugas melayani kebutuhan pimpinan secara teknis.

“Karena itu kita harus pandai-pandai, sehingga tidak terjerumus dalam dilema. Caranya tentu dengan berpegang kepada SOP dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan dijadwalkan berlangsung hingga 12 Februari 2017. **(LMC-02)**